



LAPORAN KINERJA



Triwulan II Tahun 2026

**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan “Laporan Kinerja Triwulan II Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026” dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja Triwulan ini merupakan bagian dari amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Pada dasarnya, Laporan Kinerja Triwulan ini memuat hasil dan capaian kontrak kinerja pada Tahun anggaran berjalan Triwulan II.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Triwulan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil kinerja di bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2026.

Palangka Raya, Juli 2026

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi Kalimantan Tengah,



SUHARNO, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196808061989031013



Daftar Isi

Kata Pengantar -----	1
Daftar Isi -----	2
BAB I. KINERJA -----	3
A. Capaian Kinerja-----	3
B. Akuntabilitas Keuangan-----	5
BAB II. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT -----	6
A. Kendala dan Permasalahan-----	6
B. Tindak Lanjut Penyelesaian -----	6
BAB III. PENUTUP -----	7
LAMPIRAN -----	8

BAB I. KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan II Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target dari masing-masing Indikator Kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target.

Adapun capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2026 terbagi kedalam 2 (dua) Indikator Kinerja dengan target kinerja sebesar 70 Indeks, yaitu : Pemanfaatan Sistem Pengadaan, dimana pengukuran capaian kinerjanya dari indeks yang menggambarkan tingkat optimalisasi penggunaan sistem pengadaan secara elektronik pada seluruh tahapan proses pengadaan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan ukuran tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui pendekatan sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

1. Capaian Kinerja Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan diukur dari :

1. Pengisian RUP Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai belanja PBJ dan nilai persentase 92% dengan rumus perhitungan **Jika $\geq 50\%$ x 10 atau Jika $< 50\%$ x 0.**
2. Toko Daring, sudah pernah melakukan e-Purchasing melalui toko daring (Data diambil dari Aplikasi AMEL Tahun berjalan) dengan perhitungan jika sudah pernah melaksanakan e-purchasing dengan Toko Daring mendapatkan skor 1 (satu).
3. E-Tendering, Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk e-Tendering dan nilai persentase 68% (data diambil dari aplikasi AMEL tahun berjalan) dengan rumus perhitungan **Jika $\geq 50\%$ x 10 atau Jika $< 50\%$ x 0**
4. E-Kontrak, jumlah paket dicatatkan dalam e-kontrak dibandingkan jumlah paket transaksional dan nilai persentase 6% (data diambil dari aplikasi AMEL tahun berjalan) dengan rumus perhitungan **Jika $\geq 20\%$ x 5 atau Jika $< 20\%$ x 0**

5. E-Katalog, jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk e-Purchasing/Katalog Elektronik dan nilai persentase 101% (data diambil dari aplikasi AMEL tahun berjalan) dengan rumus perhitungan **Jika $\geq 50\%$ x 4 atau Jika $< 50\%$ x 0**
6. Non e-Tendering/Non e-Purchasing, nilai realiasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk Pengadaan langsung dan penunjukan langsung dengan nilai persentase 61% (data diambil dari aplikasi AMEL tahun berjalan) dengan rumus perhitungan **Jika $\geq 50\%$ x 4 atau Jika $< 50\%$ x 0.**

Adapun formula yang digunakan dalam perhitungan capaian Indikator Kinerja tersebut adalah ;

1. Rumus Pemanfaatan Sistem Pengadaan Indeks

Jika $\geq 50\%$ x 10

Jika $< 50\%$ x 0

(data perhitungan dilihat pada [<http://simpe.kalteng.go.id/>] terlampir

Capaian kinerja Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Indikator Kinerja	Tahun 2026				
	Target Akhir Tahun	Realisasi sampai dengan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Pemanfaatan Sistem Pengadaan	70 Indeks	9.22 Indeks	18 Indeks	-	-

Realisasi capaian indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 18 Indeks.

Perhitungan capaian IKU Pemanfaatan Sistem Pengadaan pada triwulan II adalah jumlah Skor dari e-Katalog 0 (nol), e-Tendering skor 3 (tiga), Toko Daring Skor 0 (nol), SiRUP Skor 10 (sepuluh), Non Tendering/Non Purchasing Skor 1 (satu), e-Kontrak skor 3 (tiga) (data terlampir).

2. **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indikator kinerja tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dari Indikator kinerja *Tersedianya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* diukur dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan yang

diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa, yang dilakukan secara periodik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang survei kepuasan masyarakat.

Pengukuran indikator ini mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan PBJ

Diukur dari terlaksananya survei IKM minimal 1 (satu) kali dalam satu Tahun Anggaran dan Tersusunnya Laporan hasil survei IKM sebagai dokumen resmi.

2. Cakupan Responden yang Relevan

Responden berasal dari pihak yang terlibat langsung dalam proses PBJ, antara lain:

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan
- Penyedia barang/jasa
- Perangkat Daerah pengguna layanan UKPBJ

Semakin representatif responden, semakin valid nilai indeks yang dihasilkan.

3. Unsur Pelayanan dalam Proses PBJ yang Dinilai

- Kejelasan persyaratan dan dokumen pengadaan
- Kemudahan prosedur dan tahapan pemilihan
- Ketepatan waktu proses pemilihan penyedia
- Transparansi dan akuntabilitas evaluasi
- Kompetensi dan profesionalitas Pokja/pejabat pengadaan
- Responsivitas terhadap konsultasi dan pengaduan
- Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik
- Ketersediaan sarana prasarana pendukung layanan

Nilai IKM dihitung berdasarkan rata-rata persepsi responden terhadap seluruh unsur pelayanan, dengan rumus:

$$IKM = \left(\frac{\sum \text{Nilai Persepsi Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$$

Adapun capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Triwulan II sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 *Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*

Indikator Kinerja	Tahun 2026				
	Target Akhir Tahun	Realisasi sampai dengan			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Indeks Kepuasan Masyarakat	75 Indeks	0 Indeks	0 Indeks	-	-

Realisasi capaian indikator Tersedianya Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum mendapatkan nilai indeks atau 0 (nol) dikarenakan belum dilaksanakannya pemilihan penyedia yang akan melaksanakan penilaian untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, sehingga pada triwulan II nilai indek Kepuasan Masyarakat bernilai 0 Indeks dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 37,5 Indeks. (data terlampir).

B. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 1,362,297,836.38,- untuk Belanja Langsung. Sampai dengan akhir Triwulan II, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 431.932.283,- atau sekitar 32% Realisasi keuangan tersebut masih dibawah target rencana yang telah ditetapkan untuk Triwulan II yaitu sebesar 50%.

Selanjutnya, besarnya penyerapan anggaran pada Triwulan II berdasarkan Program dan Kegiatan yang menunjang capaian kinerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap total pagu anggaran masing-masing program dan kegiatan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 47.94%;
2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa, sebesar 49.05%



BAB II. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Adapun kendala dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

Capaian realisasi keuangan hingga Triwulan II tercatat sebesar 1232% dari Target 50%. Kondisi ini karena Pada awal tahun, pelaksanaan kegiatan masih difokuskan pada proses penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran, finalisasi rencana kerja, serta pemutakhiran Rencana Umum Pengadaan (RUP), sehingga penyerapan anggaran belum optimal.

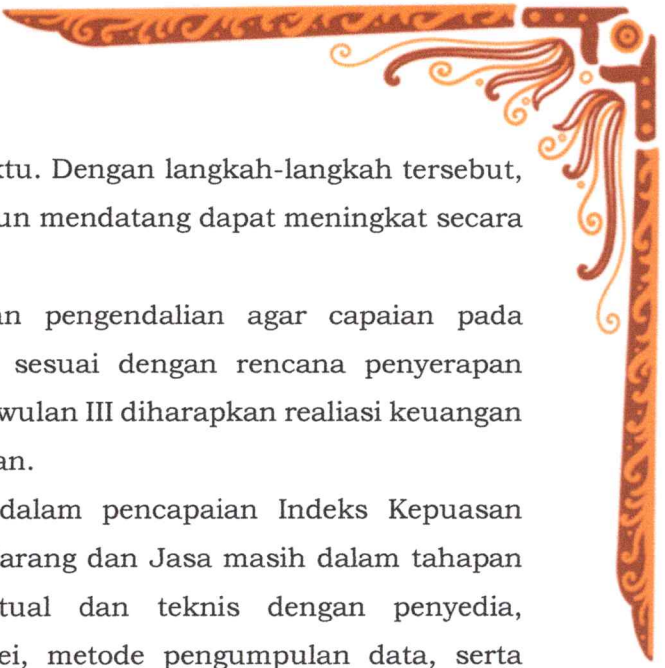
Rendahnya realisasi keuangan pada Triwulan II berpotensi menimbulkan penumpukan kegiatan pada triwulan berikutnya apabila tidak diantisipasi melalui langkah percepatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi akselerasi pada Triwulan III guna menjaga pencapaian target tahunan tetap sesuai rencana.

Pada Triwulan II, capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat ditetapkan atau belum mencapai target yang direncanakan. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan survei IKM masih dalam tahap persiapan dan proses koordinasi dengan pihak penyedia layanan survei, sehingga capaian indikator IKM baru berjalan pada Triwulan III

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang, akan dilakukan penguatan perencanaan program dan kegiatan yang lebih terukur, selaras dengan sasaran strategis, serta berbasis pada evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Setiap kegiatan akan dirancang dengan indikator kinerja yang jelas, target yang realistis, dan jadwal pelaksanaan yang terencana secara optimal.

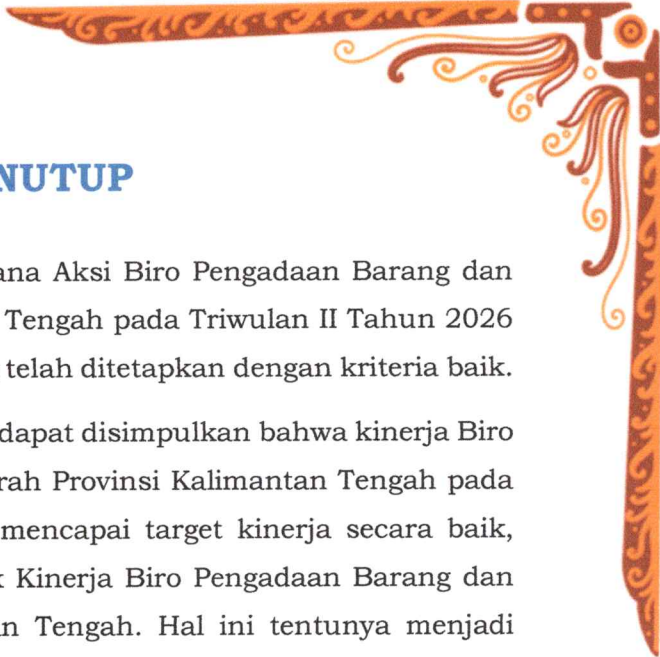
Selain itu, akan dilakukan peningkatan koordinasi antar bagian, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan evaluasi kinerja akan dilaksanakan secara berkala guna mengidentifikasi hambatan sejak dini dan memastikan tindak lanjut



perbaikan dapat dilakukan tepat waktu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian kinerja pada tahun mendatang dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

Diperlukan langkah percepatan dan pengendalian agar capaian pada triwulan berikutnya dapat kembali sesuai dengan rencana penyerapan anggaran tahunan, sehingga pada Triwulan III diharapkan realiasi keuangan dapat mencapai target yang ditentukan.

Untuk tindak lanjut penyelesaian dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Biro Pengadaan Barang dan Jasa masih dalam tahapan penyelesaian administrasi kontraktual dan teknis dengan penyedia, termasuk finalisasi instrumen survei, metode pengumpulan data, serta penentuan responden yang representatif dari pengguna layanan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, nilai indeks secara kuantitatif belum dapat dihitung pada periode Triwulan II dan akan terlaksana pada triwulan ke III.



BAB III. PENUTUP

Secara umum, pencapaian target Rencana Aksi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan II Tahun 2026 sudah mencapai target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan kriteria baik.

Dari capaian Indikator Kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan II Tahun 2026 ini cukup mampu mencapai target kinerja secara baik, sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi seluruh aparatur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih meningkatkan kinerja lagi agar mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk realisasi keuangan pada Triwulan II Tahun 2026 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 431.932.283,- atau sekitar 32% dari total pagu Anggaran sebesar Rp. 1,362,297,836.38,-

Demikian Laporan Triwulan II ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode-periode mendatang.



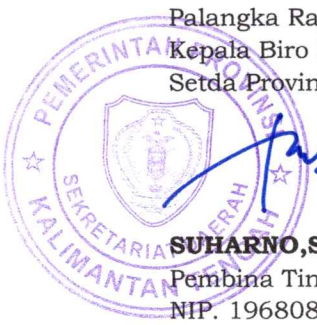
LAMPIRAN



A. REALISASI KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Tahun	Capaian Triwulan I			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (Indeks)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi digital yang berbasis elektronik	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Indeks	70	35 Indeks	18	18.00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	37.5 Indeks	0	-	

Palangka Raya, Juli 2026
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi Kalimantan Tengah,


SUHARNO,S.T.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196808061989031013

B. REALISASI KEUANGAN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			965,531,884.38	482,765,942	237,328,533	25%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,830,000	915,000	877,250	47.94%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	305,000	152,500	302,750	99.26%	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	305,000	152,500	295,500	96.89%	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	305,000	152,500	-	0.00%	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	305,000	152,500	279,000	91.48%	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	305,000	152,500	-	0.00%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	305,000	152,500	-	0.00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		99,425,000	49,712,500	-	0.00%	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99,120,000	49,560,000	-	0.00%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	305,000	152,500	-	0.00%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	-	-	-	0.00%	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	0.00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		23,700,000	11,850,000	7,204,800	30.40%	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	0.00%	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19,000,000	9,500,000	7,204,800	37.92%	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4,700,000	2,350,000	-	0.00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		721,888,484.38	360,944,242	192,469,175	26.66%	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,000,000	44,500,000	48,310,310	54.28%	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengagandaan	67,357,429.38	33,678,715	12,868,250	19.10%	
			Facilitasi Kunjungan Tamu	6,600,000	3,300,000	3,500,000	53.03%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	558,931,055	279,465,528	127,790,615	22.86%	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		72,188,400	36,094,200	24,893,308	34.48%	
			Penyediaan Jasa Surat Menjurat	300,000	150,000	-	0.00%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,000,000	1,500,000	-	0.00%	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	15,000,000	6,915,000	23.05%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38,888,400	19,444,200	17,978,308	46%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		46,500,000	23,250,000	11,884,000	25.56%	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46,500,000	23,250,000	11,884,000	25.56%	
2	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			396,765,952	198,382,976	194,603,750	49.05%	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		142,364,000	71,182,000	14,978,000	10.52%	
			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	100,000,000	50,000,000	-	0.00%	
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	22,665,000	11,332,500	-	0.00%	
			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	19,699,000	9,849,500	14,978,000	76.03%	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		194,561,952	97,280,976	179,625,750	92.32%	
			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	115,000,000	57,500,000	114,330,000	99.42%	
			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	61,661,952	30,830,976	60,911,250	98.78%	
			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	17,900,000	8,950,000	4,384,500	24.49%	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		59,840,000	29,920,000	-	0.00%	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	4,850,000	2,425,000	-	0.00%	
			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	4,300,000	2,150,000	-	0.00%	
			Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	50,690,000	25,345,000	-	0.00%	
TOTAL				1,362,297,836.38	681,148,918	431,932,283	32.00%	

Palangka Raya, Juli 2026
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi Kalimantan Tengah,



SUHARNO, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196808061989031013

Bar chart showing the value of procurement packages (Rp) and the number of packages (Jumlah Paket) for four years: 2023, 2024, 2025, and 2026. The chart compares four categories: RUP Pagu (Rp), Tender Realisasi (Rp), Paket RUP, and Paket Tender.

Tahun	RUP Pagu (Rp)	Tender Realisasi (Rp)	Paket RUP	Paket Tender
2023	Rp 135,062 M	Rp 780,96 M	72	169
2024	Rp 1,775,231 M	Rp 1,040,671 M	242	245
2025	Rp 1,987,962 M	Rp 1,462,772 M	226	226
2026	Rp 585,343 M	Rp 399,164 M	125	113

• Nilai Pagu RUP berdasarkan Metode Pengadaan Tender, Seleksi, dan Tender Cepat

Dashboard

Pilih Tahun

Nilai Pagu (Rp)

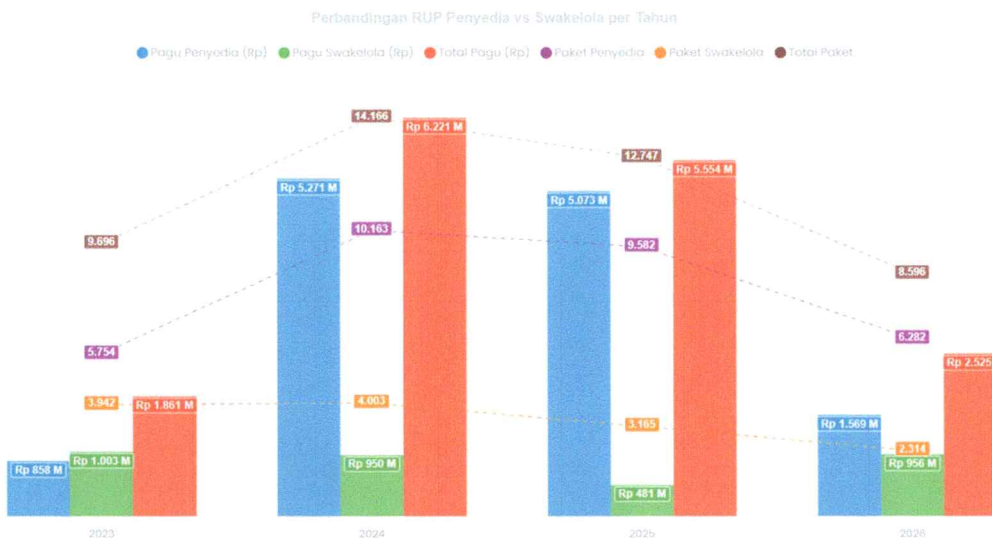
6.642.779 M

5.122.080 M

3.421.307 M

1.710.694 M

0 M



Sign in

SIMPE > Dashboard

2026

🔍 🏠 📄

16.543

13.639

11.687

9.739

7.791

5.843

3.896

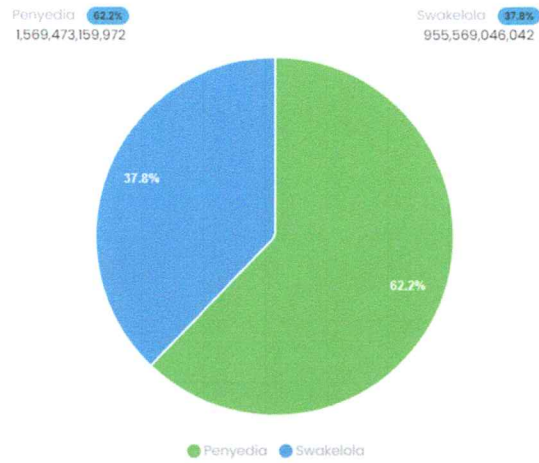
1.948

0



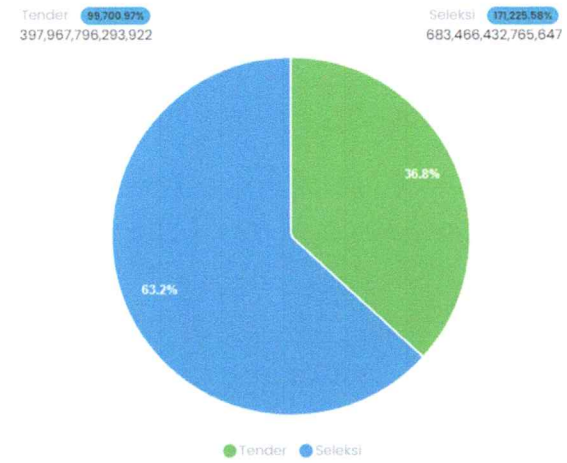
Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Rp. 2,525,042,206,014



Realisasi Tender

Rp. 399,161,404,728



Rp. 14,540,110,923

Rp. 343,247,884,832 21.87 %



Progress Non Tender						
Semua			Belum e-Kontrak			Sudah E-Kontrak
Jenis	Jumlah Paket	Total Pagu	Jumlah Paket	Total Pagu	Jumlah Paket	Total Pagu
Pengadaan Langsung	143	18,126,672,336.00	121	16,862,940,841.00	22	1,263,731,495.00
Penunjukan Langsung	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Total	143	18,126,672,336.00	121	16,862,940,841.00	22	1,263,731,495.00

TOTAL Non Tender + Tender	
Jumlah Paket Semua	290
Jumlah Paket E-Kontrak	169
Prosentase	58.28%

Tahun Anggaran

Jenis Instansi

Instansi

Eselon

Satuan Kerja

2026

Pilih Jenis Instansi

(Pilih Jenis Instansi dahulu)

(Pilih Jenis Instansi dahulu)

(Pilih Instansi dahulu)

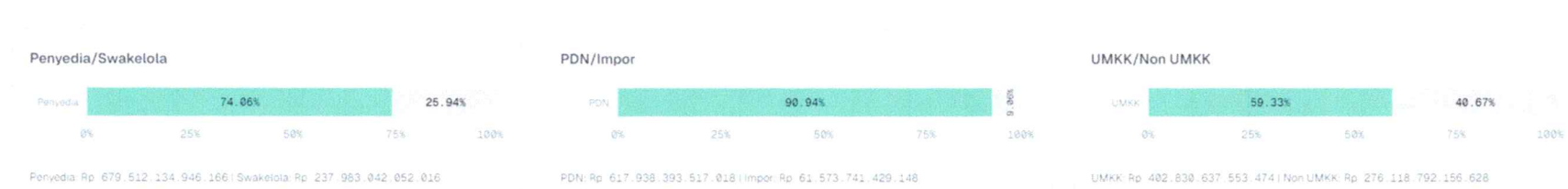
Ringkasan Perencanaan dan Realisasi Pengadaan

Nilai

Paket

Data

Perencanaan Pengadaan



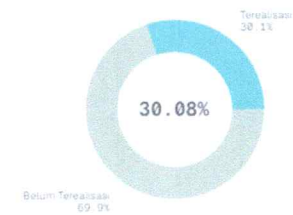
Realisasi Pengadaan

Total Realisasi

Rp 275.952.689.506.923



% Realisasi



30.08%

Realisasi Penyedia



Realisasi: Rp 272.638.872.898.579 | Perencanaan: Rp 679.512.134.946.166

Realisasi Swakelola



Realisasi: Rp 4.060.298.607.889 | Perencanaan: Rp 237.983.042.052.016

Realisasi Metode Pemilihan (Penyedia) - Nilai



Realisasi Jenis Pengadaan (Penyedia) - Nilai

